

Menjadikan PHI Aktor Positif Melalui Program CSR dan Comdev

Berbagai wilayah kerja yang berada di bawah PHI sangat aktif dalam mengembangkan kegiatan pengelolaan lingkungan dan masyarakat yang dikemas dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dan Pengembangan Masyarakat (*Community Development*).

Program-program tersebut banyak yang mendapat penghargaan karena dirancang dan dikerjakan dengan sangat baik. Ternyata kunci keberhasilannya adalah pada filosofi yang mendasarinya.

Dalam percakapan dengan *Energia Kalimantan*, Manager Environment PHI, Kemas Adrian, menjelaskan ada dua hal yang menjadi filosofi berbagai aktivitas pengelolaan lingkungan dan CSR di PHI group, yang bermuara pada *output* program-program kegiatan:

Pertama, pengelolaan risiko, karena usaha hulu migas adalah industri ekstraktif, yang menguras sumber daya bumi. "Banyak kegiatan operasi sektor hulu migas ini yang memberikan dampak besar terhadap lingkungan, misalnya saja ketika kami mengadakan *land clearing* untuk operasi pengeboran, yang berarti harus ada akuisisi tanah/lahan milik masyarakat atau negara," katanya. Untuk itulah harus terlebih dahulu diadakan pemetaan risiko-risiko untuk mengetahui dan meminimalkan bila ada dampak negatif yang ditimbulkan.

"Kalau *land clearing* itu ada di hutan lindung, atau tanah adat dan lain sebagainya, maka segala bentuk perizinan yang dibutuhkan harus diurus dan didapatkan terlebih dahulu," lanjutnya.

Kedua, investasi sosial, artinya aktivitas lingkungan yang dikerjakan dalam kelompok PHI bukan sekadar *green life style* (gaya hidup hijau, Red.) melainkan bagaimana mengadakan *offset* (mengubah arah, Red.) dampak lingkungan ke level terendah, walaupun tidak bisa mencapai nol.

Sebagai misal, katanya, di Kecamatan Handil PHM menggunakan Kawasan Hutan Industri untuk kegiatan operasi, maka perusahaan harus mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari kementerian terkait. Bila PPKH didapat, itu artinya bila PHM menggunakan kawasan hutan seluas satu hektare di Kecamatan Handil, maka perusahaan diwajibkan menghijaukan hutan di tempat lain seluas satu hektare juga sebagai kompensasi.

Perwira dan masyarakat PPU bersama mengolah limbah sabut kelapa menjadi kriya bernilai ekonomi.





Antusiasme masyarakat mengikuti pelatihan pembuatan kriya limbah sabut kelapa.

“Jadi yang kami kerjakan bukanlah *green life style*, melainkan bagaimana menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan. Kami membutuhkan *social license to operate* (SLO) supaya masyarakat mendukung,” kata Kemas.

SLO ini menjadi hal penting karena ia merupakan suatu bentuk penerimaan informal dan persetujuan yang diberikan kepada sebuah organisasi/perusahaan oleh masyarakat lokal dan para pemangku kepentingan lain untuk berkegiatan di wilayah mereka.

“Hal itu berarti perusahaan berhasil mendapatkan kepercayaan dan persetujuan mereka. SLO ini lebih berbasis *trust*, legitimasi dan keadilan ketimbang izin formal semata. Pada umumnya masyarakat lokal memberikan izin itu karena perusahaan dinilai telah beroperasi dengan bertanggung jawab, transparan, terus melibatkan masyarakat, dan menghindari konflik sejauh mungkin,” jelasnya.

Mencegah Viral

Lebih jauh Kemas menjelaskan PHI menerapkan pendekatan *As Low As Reasonably Practicable* (ALARP), yakni sebuah prinsip manajemen risiko untuk pengelolaan lingkungan dan masyarakat hingga ke tingkat serendah mungkin yang dapat dicapai dengan cara-cara yang wajar.

Dia tidak menampik bahwa pendekatan yang ditempuh perusahaan tidak selalu berhasil 100% menghilangkan persepsi negatif kepada perusahaan, meski demikian dia melihat persepsi positif jauh lebih dominan.

“Kalau melihat dari sisi pemberitaan di media, maka kami mendapati tetap ada pemberitaan-pemberitaan yang negatif, namun sebaliknya pemberitaan mengenai kepuasan masyarakat jauh melebihi pemberitaan mengenai keluhan yang muncul,” katanya.

PHI juga berupaya agar perusahaan tidak mengalami *trend* yang berkembang di media sosial hari ini yakni “*No Viral, No Justice*.”

Dia mencontohkan di Kalimantan terdapat Taman Nasional Kutai dan di situ ada kawasan yang masuk Wilayah

Kerja PHI, selain ada tambang batubara dan sebagainya. “Bila kami harus mengebor 10 sumur di situ, maka kami akan berusaha menghindarinya sejauh mungkin demi menurunkan risikonya. Misalnya, kami memindahkan lokasi sumur-sumur itu dari zona utama, selama ada izin dari pengelola Taman Nasional. Sejauh ini, setelah bertahun-tahun beroperasi, tidak ada pemberitaan yang negatif mengenai kami,” katanya.

Dia mengakui langkah tersebut memang menjadi jauh lebih mahal karena akhirnya harus menggunakan teknologi yang lain untuk pengeboran horizontal. “Tapi marilah kita bandingkan, misalnya, pada kasus pertambangan nikel di Raja Ampat, perusahaan itu memiliki Izin Usaha Pertambangan yang sah sehingga berbagai izin lain yang dibutuhkan dapat diurus dan didapatkan. Namun karena informasi dan pemberitaan mengenai kegiatannya di area konservasi menjadi viral akhirnya mereka ditutup. Hukum yang berlaku hari ini adalah ‘*no viral, no justice*’ faktor inilah yang kami perhitungkan karena ada risiko pada reputasi yang rusak,” jelasnya.

Tak Kejar Penghargaan

Ketika sebuah program CSR atau Comdev dirancang tentulah bukan dalam rangka mendapat penghargaan atau pujian, tetapi selalu dimulai dengan pemetaan sosial. “Kami tidak langsung *jump to conclusion*, melainkan kami memetakan daerah-daerah yang akan dikurcurkan program,” jelasnya.

Itulah sebabnya tiap perusahaan yang ada di lingkungan PHI mempunyai berbagai program yang tidak sama. Misalnya, Negeri Energi Terapung adalah program CSR untuk desa-desa yang membutuhkan energi di delta Mahakam, kemudian program Limbah Sabut Kelapa dikembangkan untuk menjadikan sabut kelapa sebagai barang bernilai ekonomi tinggi, tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran dan melimpahnya sabut kelapa di Penajam Paser Utara yang menjadi

Wilayah Kerja PHKT.

Selain itu, berbagai program CSR dan Comdev tersebut dibuat melibatkan berbagai lapisan masyarakat (mulai dari proses pemetaan sosial), masukan dari para Community Development Officer (CDO), juga masukan dari Babinsa atau Babinkamtibmas, lalu dibawa ke Zona, dari situ dibahas lagi di PHI, lalu ke Subholding Upstream di PHE, dan akhirnya menjadi WP&B yang harus disetujui oleh SKK Migas.

Hal ini juga yang menjelaskan mengapa berbagai program tersebut berkisar di seputar wilayah operasi dan jarang sekali menyeberang ke wilayah, atau provinsi lain yang jauh dari daerah operasi. "Misalnya, di Kecamatan Muara Badak kami akan mengadakan kegiatan pengeboran, berarti di sana ada risiko, dan berdasarkan pemetaan sosial kami mengadakan kegiatan CSR di sana. Dengan demikian tidak ada kegiatan CSR di luar wilayah kerja, karena tidak ada kewenangan kami di luar itu," jelas Kemas.

Namun tetap ada program yang lintas wilayah, misalnya PHI bekerjasama dengan Borneo Orangutan Survival untuk menyelamatkan orangutan, dukungan seperti ini berada di luar wilayah kerja perusahaan. Atau program Beasiswa Sobat Bumi Kalimantan yang bersifat lintas wilayah kerja, yakni pemberian beasiswa bagi sejumlah mahasiswa di Kalbar dan Kalteng selain Kaltim, Kaltara dan Kalsel yang merupakan penghasil migas.

Menyusun Skala Risiko

Ketika ditanya bagaimana PHI menyusun skala risiko dalam menjalankan kegiatan operasinya. Kemas mengatakan bahwa pengelolaan tata ruang dan tata wilayah di Indonesia memang unik. Misalnya, pengelolaan di bawah tanah merupakan kewenangan Kementerian ESDM, kalau di atas tanah kewenangan ada di Kementerian Kehutanan, lalu di laut milik kementerian lain, sedangkan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota).

Itu sebabnya dalam pengelolaan lingkungan dan masyarakat pun PHI berpedoman pada Peta SIGARED (Sistem Informasi Geospasial Area dan Reservoir Data) yang dimiliki Pertamina. Dalam SIGARED tersedia data teknis lapangan, seperti: peta sumur (lokasi, status, kedalaman), peta seismik, batas wilayah kerja, peta *reservoir* dan lapisan geologi, serta infrastruktur produksi (pipa, fasilitas, *platform offshore*).

"Misalnya, bila dari 100 sumur, 20 di antaranya masuk area sulit, maka dengan menggunakan peta SIGARED kami dapat menghitung risikonya seperti sisi lingkungannya, sisi finansialnya dan seterusnya. Jangan sampai nanti ada yang membuat foto atau video di kawasan yang dinilai berisiko tinggi dan memviralkannya: Pertamina beroperasi di wilayah konservasi, itu yang harus dihindari. Dengan demikian prinsipnya: harus untung



Proses pengolahan sabut kelapa di PPU dengan dukungan mesin.

boleh tidak besar, tapi berkelanjutan," kata Kemal.

Pengelolaan risiko ini termasuk juga dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal. Misalnya, tim PHI kerap berdialog dan menjelaskan kepada para tokoh masyarakat bahwa tidaklah benar anggapan bila terdapat pembukaan fasilitas operasi yang baru maka orang lokal tidak kebagian pekerjaan. Pada kesempatan-kesempatan itu selalu disampaikan bahwa mendatangkan pekerja dari luar daerah itu jauh lebih mahal dibandingkan menggunakan tenaga lokal, bila hal itu terjadi tak lain karena ada kesenjangan pengetahuan dan keterampilan.

"Sehingga kami menyekolahkan orang-orang lokal ke pulat pelatihan migas di Cepu agar mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan operasi migas. Dan sejak 2017 kami punya spirit untuk kebutuhan tenaga kerja *non skill* maka kami menggunakan tenaga kerja lokal," jelasnya. Kemudian, banyak kegiatan CSR PHI juga terkait dengan pendidikan bagi penduduk lokal.

"Jika diperhatikan berbagai kegiatan CSR kami berbeda-beda antar wilayah kerja tergantung kompleksitas program. Bagi PHI penggunaan tenaga kerja lokal bagus buat bisnis," katanya.

Kemal juga mengatakan bahwa program-program CSR PHI bersifat *non-charity*, sehingga selalu ada *exit plan*-nya. Misalnya, untuk program lebah kelulut, PEP Sangatta Field hanya memberikan pengetahuan dan modal, dan kalau programnya sudah berjalan baik, Pertamina akan mundur. "Kami tidak mau program CSR yang sifatnya *charity*," katanya.

Kemal menegaskan bahwa berbagai rancangan program PHI yang agresif dan bernilai itu juga untuk melindungi masyarakat. "Kami bukan hanya *profit oriented* tetapi juga *social oriented*. Kami berkegiatan tetapi juga berorientasi bagi masa depan. Pertamina Hulu Indonesia berusaha menjadi aktor positif, bukan aktor negatif," katanya. ■